

Anggaran Keluarga Pahlawan Disetop, Prabowo Didesak Ambil Sikap Tegas

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 14/02/2025



ORINEWS.id – Pemprov DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2025 memberitahukan penghapusan alokasi anggaran pemberian penghargaan kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan.

Pemberitahuan itu dilakukan melalui surat bernomor: e-0063/S0.03.05 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Praktis hal tersebut menuai sorotan dari banyak kalangan.

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto Emik sempat terkejut dengan berita tersebut.

“Saya menilai bahwa isu ini sangat krusial karena menyangkut penghormatan terhadap perjuangan, pengorbanan, dan tumpah darah para pahlawan serta perintis kemerdekaan yang telah berjuang demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk segera merespons hal ini,” kata Sugiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat, 14 Februari 2025.

Terlebih kebijakan itu diambil dengan alasan adanya optimalisasi kebijakan keuangan daerah guna menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta.

“Jika surat dari Dinsos Pemprov DKI Jakarta ini benar adanya, maka hal ini perlu mendapat respons cepat dari berbagai pihak, terutama masyarakat Jakarta,” tegasnya.

Ia pun meminta Presiden [Prabowo Subianto](#) untuk mengambil sikap tegas terkait kebijakan kontroversial ini.

“Dalam situasi ini, Partai Gerindra, yang didirikan oleh Jenderal (HOR) (Purn) Presiden [Prabowo](#) Subianto, harus segera mengambil sikap tegas. Gerindra harus segera meminta klarifikasi terkait kebenaran surat tersebut. Jika surat tersebut benar adanya, maka Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta harus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan keputusan ini,” imbuhnya.

Tidak hanya Gerindra, tetapi fraksi-fraksi partai lain seperti [PDIP](#), Golkar, [Demokrat](#), PAN, [PKB](#), dan lainnya juga perlu melakukan langkah yang sama.

“Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta harus segera menekan Pemprov DKI Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan,” beber dia.

Pasalnya, langkah ini penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara.

“Selain itu, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangatlah aneh jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Janda Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan dihapus," pungkas Sugiyanto.[]